



**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN GOOD GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada SKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Teguh Erawati, SE., M.Sc., Ak., CA., ACPA^{1*}
Choirul Anam Soleh²**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
*email: eradimensiarch@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at Yogyakarta Special Region Province SKPD JL. Malioboro, Kepatihan Danurejan Yogyakarta complex, 55213. This study tried to analyze whether there was an effect of performance based budgeting and could realize good governance such as transparency in terms of decisions on the location of budget resources and improvements to government financial performance area. Variables X1 research indicators (performance based budget) include: preparation, ratification, implementation, evaluation and reporting. Variable research indicators X2 (Good Governance) include: participation, transparency, and law enforcement. While for variable Y (financial performance of local governments) include: effectiveness, efficiency, employee growth and satisfaction of violations. The method used in this research is descriptive analysis. The purpose of this study is to add indicators of research variables related to good governance that have inherent characteristics in good governance practices that contain values that make state administrators, business actors and society in general can more effectively work in realizing prosperity in carrying out their duties in accordance with procedures used, so that inefficiencies and waste that cause high costs and lags in public services can be reduced this study uses the nature of the quantitative approach. As for the population in this study are employees of several units of agencies or bureaus that are in the Special Region of Yogyakarta Province SKPD in the budget section. Sampling technique uses primary data to obtain data such as questionnaires. Data quality test with a validity, reliability test.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2021-05-01
Direview: 2021-09-15
Disetujui: 2021-11-23
Terbit: 2021-12-21

Keyword:
performance-based budgeting; good governance; financial performance.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pelaksanaan di pemerintah yang mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat maka pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, serta Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *ouput* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Penyusunan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar *value for money/performance budgeting system* (anggaran kinerja). Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang otonomi dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi diantaranya, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fenomena pembangunan yang berkembang saat ini adalah terjadinya krisis di segala bidang dan adanya tuntutan ekonomi daerah serta korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan *good governance* yang ditandai adanya tiga pilar utama, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, untuk itu maka perlu adanya penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Anggaran berbasis kinerja merupakan salah bentuk reformasi pengelolaan sektor publik yang berperan dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pendapat Vian (2014) bahwa ABK dirancang untuk dapat mewujudkan *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas dalam hal keputusan alokasi sumber daya anggaran. Prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, maka penggunaan dana publik akan dapat dilakukan dengan lebih hemat, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan.

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan

Anggaran berbasis kinerja dinilai lebih aspiratif dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional. Hal ini dikarenakan dalam sistem anggaran berbasis kinerja masyarakat lebih dilibatkan (ikut berpartisipasi) dalam menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan APBD dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi. Sehingga kegiatan yang diajukan untuk proses penganggaran dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Performance budgeting* (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Bastian, 2006:171) dalam penelitian (Purnamasari, 2017).

Serta menurut penelitian (Purnamasari, 2017) bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H1: Penyusunan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan

Good governance diterapkan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat membuat pemerintah bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dikarenakan memiliki beberapa unsur nilai yang mempengaruhi hal tersebut. Apabila nilai-nilai *good governance* diterjemahkan menjadi indikator kinerja seorang pejabat publik atau sebuah satuan birokrasi, maka motivasi untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai *good governance* dengan sendirinya akan berkembang dalam birokrasi publik tersebut. Pejabat publik akan lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang digunakan, sehingga inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya dan kelambanan pelayanan publik bisa berkurang. Anggaran dan berbasis kinerja suatu alat ukur kerangka pikir terhadap kinerja pemerintah daerah yang akan memberikan hasil mengenai suatu anggaran daerah. Selain itu untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh sejauh mana alat ukur kerangka pikir ini berfungsi. *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan solid sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kusmayadi, 2009) dalam (Indriana, 2019) *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

H2: *Good Governance* sebagai indikator dalam penyusunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Dan Good Governance

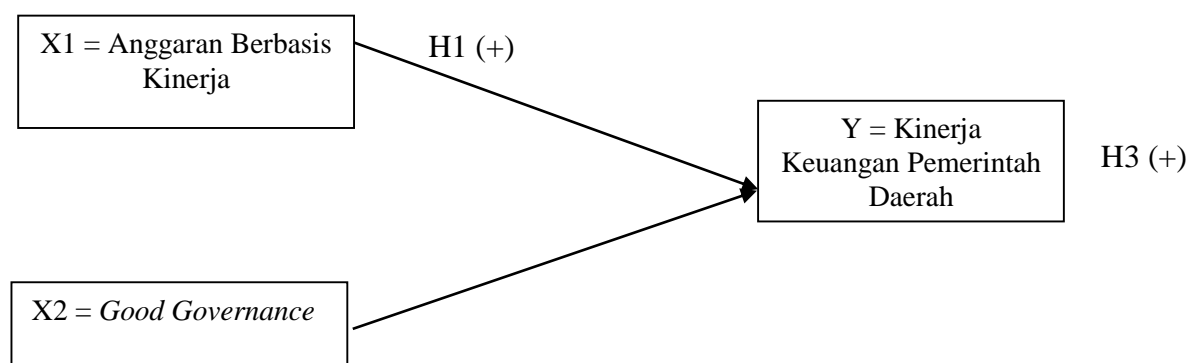
Kinerja keuangan yaitu suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Gambaran mengenai kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tentang perumusan skema strategi dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini dimaksudkan kepada tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah merupakan kemampuan pemerintah daerah guna mengelola keuangan

yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiaya (1) pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, (2) pembangunan dan (3) pelayanan sosial masyarakat (Ezpinoza, 2014 : 55) dalam penelitian (Purnamasari, 2017) bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian pendukung lainnya yang dilakukan oleh (Indriana, 2019) *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

H3: Anggaran berbasis kinerja dan *Good Governance* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Pikir

Gambar 1



METODE PENELITIAN

Teknik data dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan menggunakan metode kuantitatif karena data yang disajikan berhubungan dengan angka (kuantitatif) yang menggunakan kuesioner skala likert 5 (lima) poin. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang berada di wilayah Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya BAPPEDA, BPPKA, Biro Tata Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Umum dan Protokol, dan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.

Definisi Operasional

Operasi variabel merupakan suatu cara untuk mengatur suatu konsep dan bagaimana suatu konsep harus diukur sehingga terdapat Variabel-variabel yang dapat menyebabkan masalah dari suatu variabel yang situasi dan kondisinya tergantung oleh variabel lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel Independen (bebas) dan variabel Dependen (terikat), berikut merupakan tabel operasional independen dan dependen:

Tabel 1
Indikator Operasional Variabel Independen (X1)
Anggaran Berbasis Kinerja

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja(X1)	Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005)	a. Persiapan b. Ratifikasi c. Implementasi d. Evaluasi dan Pelaporan	Likert

Tabel 2
Indikator Operasional Variabel Independen (X2)
Good Governance

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Good Governance</i> (X2)	(Heriyanto:2015) mengemukakan dalam skripsi (Pertiwi, Siti Hardianti Darma:2017) bahwa good governance sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat.	a. Akuntabilitas b. Transparansi c. Keadilan d. Partisipasi	<i>Likert</i>

Tabel 3
Indikator Operasional Variabel Dependen (Y)
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Dari hasil kerja menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun tidak langsung.	a. Perencanaan b. Investigasi c. Koordinasi d. Evaluasi e. Pengawasan	<i>Likert</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja dan good governance, satu variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian statistik dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Anggaran Berbasis Kinerja	60	70	93	77.20	4.313
<i>Good Governance</i>	60	40	58	45.72	3.880
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	60	55	78	65.88	3.751
Valid N (listwise)	60				

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa anggaran berbasis kinerja sebanyak 60 responden memiliki skor terendah 70 dan tertinggi 93 kemudian memiliki rata-rata sebesar 77,20 dengan standar deviation sebesar 4,313. Variabel good governance sebanyak 60 responden memiliki skor terendah 40 dan tertinggi 58 serta memiliki rata-rata sebesar 45,72 dengan standar deviation 3,880, dan untuk variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dari 60 responden skor terendahnya 55 dan tertinggi 78 kemudian memiliki rata-rata sebesar 65,88 dengan standar deviation sebesar 3,751.

Uji Validitas

Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan rumus korelasi Produk Moment yaitu menurut (Sugiyono, 2005). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 21. Item

pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki r hitung $>$ r tabel . Hasil Uji Validitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig	r-tabel	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	Item 1	0,035	0,254	Valid
	Item 2	0,001	0,254	Valid
	Item 3	0,049	0,254	Valid
	Item 4	0,000	0,254	Valid
	Item 5	0,003	0,254	Valid
	Item 6	0,018	0,254	Valid
	Item 7	0,021	0,254	Valid
	Item 8	0,028	0,254	Valid
	Item 9	0,038	0,254	Valid
	Item 10	0,015	0,254	Valid
	Item 11	0,012	0,254	Valid
	Item 12	0,017	0,254	Valid
	Item 13	0,002	0,254	Valid
	Item 14	0,026	0,254	Valid
	Item 15	0,001	0,254	Valid
	Item 16	0,037	0,254	Valid
	Item 17	0,005	0,254	Valid
	Item 18	0,000	0,254	Valid
	Item 19	0,000	0,254	Valid
	Item 20	0,027	0,254	Valid
	Item 21	0,004	0,254	Valid
<i>Good Governance</i>	Item 1	0,000	0,254	Valid
	Item 2	0,001	0,254	Valid
	Item 3	0,000	0,254	Valid
	Item 4	0,029	0,254	Valid
	Item 5	0,013	0,254	Valid
	Item 6	0,003	0,254	Valid
	Item 7	0,019	0,254	Valid
	Item 8	0,000	0,254	Valid
	Item 9	0,000	0,254	Valid
	Item 10	0,020	0,254	Valid
	Item 11	0,016	0,254	Valid
	Item 12	0,000	0,254	Valid
	Item 13	0,000	0,254	Valid
	Item 14	0,006	0,254	Valid
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Item 1	0,035	0,254	Valid
	Item 2	0,002	0,254	Valid
	Item 3	0,002	0,254	Valid
	Item 4	0,010	0,254	Valid
	Item 5	0,001	0,254	Valid
	Item 6	0,000	0,254	Valid
	Item 7	0,001	0,254	Valid
	Item 8	0,000	0,254	Valid
	Item 9	0,000	0,254	Valid
	Item 10	0,000	0,254	Valid
	Item 11	0,000	0,254	Valid

Item 12	0,000	0,254	Valid
Item 13	0,000	0,254	Valid
Item 14	0,004	0,254	Valid
Item 15	0,001	0,254	Valid
Item 16	0,020	0,254	Valid
Item 17	0,019	0,254	Valid
Item 18	0,020	0,254	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan besarnya nilai signifikansi seluruh butir pertanyaan nilainya lebih kecil dari 0,05. Demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir dinyatakan valid dan kuisisioner dalam penelitian dapat digunakan untuk analisis selanjutnya yaitu regresi linier berganda.

Uji Realibilitas

Teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian ini dengan teknik Cronbach's alpha (Ghozali, 2001). Apabila nilai *Cronbach's CoefficientAlpha* lebih besar dari 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbach's CoefficientAlpha* lebih kecil 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliabel*. Berdasarkan hasil output data SPSS yang tersaji dalam tabel 4.4 tersebut disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach's Alpha yang lebih tinggi dari 0,600. Hasil pengujian reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Crobach	Nilai kritis	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,604	0.6	Reliabel
Good Governance	0,623	0.6	Reliabel
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	0,667	0.6	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel 6 diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,604, good governance 0,623, dan kinerja keuangan pemerintah daerah 0,667 dimana nilai setiap variabel lebih tinggi dari nilai koefisien *Cronbach Alpha* yang ditetapkan minimal sebesar 0,600, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan lienaritas.

Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan Kolmogorov smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Uji Normalitas

Unstandar_residual	Batas	Keterangan
0,110	0,05	Normal

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui nilai *asympt.sig* sebesar 0,110 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 8 Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,800	1,250	Tidak terjadi multikolinieritas
Good Governance	0,800	1,250	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,747	0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Good Governance	0,637	0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

Uji Lienaritas

Tabel 10 Uji Lienaritas

Variabel	Deviation from Linearity	Batas	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,065	0,05	Linier
Good Governance	0,098	0,05	Linier

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian terjadi linearitas.

Analisis Hipotesis

Hasil Regresi Linier Berganda

Penelitian ini, dalam menganalisis regresi linear berganda penulis menggunakan seri program statistik SPSS. SPSS adalah suatu program *software* komputer yang digunakan untuk mengolah data baik parametrik maupun nonparametrik, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Beta	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	22,455				
Anggaran Berbasis Kinerja	0,242	0,278	2,738	0,008	Signifikan
Good Governance	0,542	0,561	5,526	0,000	Signifikan
F hitung	32,225				
Sig F	0,000				
R square	0,531				
Variabel Dependent					: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 11 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 22,455 + 0,242X_1 + 0,542X_2$$

1. Konstanta = 22,455

Artinya jika tidak ada variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Governance* yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 22,455 satuan.

2. $b_1 = 0,242$

Artinya jika variabel Anggaran Berbasis Kinerja meningkat sebesar satu satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,242 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

3. $b_2 = 0,542$

Artinya jika Variabel *Good Governance* meningkat sebesar satu satuan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,542 dengan anggapan variable bebas lain tetap.

Teknik Analisis Data

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.008 (**0.008 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 (**0.000 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh *Good Governance* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 (**0.000 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.

Koefisien Determinasi (*r square*)

Berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukkan besarnya koefisien determinasi (r^2 square) = 0,531, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 53,1% sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.008 (**0.008 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.

Partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan anggaran. Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit SKPD membuat usulan-usulan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bagian, Kepala Bagian menyampaikan usulan tersebut

kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan pemerintahan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial.

Guna mencegah dampak fungsional atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan (Bambang, 2017).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Solikhun (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh *Good Governance* secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.

Pemerintah daerah merupakan pihak penyelenggara setiap urusan pemerintahan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan terhadap hasil capaian dalam membangun dan mengelola roda perekonomian di lingkungannya. Salah satu penilaian untuk mengetahui perkembangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan daerahnya dilakukan dengan mengukur kinerja. Banyak faktor yang mendukung dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, salah satunya adalah tata kelola pemerintah atau *good governance*. Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi di masyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah.

Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan perusahaan yang baik atau *good corporate governance* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Handi (2016) mengatakan bahwa “kinerja sebuah pemerintah daerah akan lebih baik bila prinsip-prinsip *good governance* diterapkan pada pemerintah daerah”. Maka secara tidak langsung *good governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah di provinsi sehingga dapat disimpulkan bahwa *good government governance* memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Solikhun (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penyusunan Anggaran Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.000 ($0.000 < 0,05$). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan *Good Governance* secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.”

Partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bisa sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan

anggaran. Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Banyak faktor yang mendukung dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, salah satunya adalah tata kelola pemerintah atau *good governance*.

Pengelolaan pemerintah yang kurang baik banyak menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat atau pihak lainnya, salah satu contohnya adalah pemerintah akan mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat dan akan mempertajam isu-isu krusial yang terjadi dimasyarakat. Jika tata kelola pemerintahnya diterapkan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kinerja pemerintah yang dilakukan akan baik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih tinggi kepada pemerintah. Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan perusahaan yang baik atau *good governance* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Handi (2016) mengatakan bahwa “kinerja sebuah pemerintah daerah akan lebih baik bila prinsip-prinsip *good governance* diterapkan pada pemerintah daerah”. Maka secara tidak langsung *good governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah di provinsi sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Solikhun (2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh Penyusunan Anggaran dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan (Febrina Astria, 2016) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian menurut (Purnama Sari, 2017) anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
2. *Good Governance* secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian menurut (Indriana, 2019) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan juga dengan penelitian menurut (Nasrun, 2018) *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene.
3. Anggaran berbasis kinerja dan *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut (Dendy, 2016) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Serta sejalan dengan penelitian menurut (Indriana, 2019) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Ademirna. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan, Opini Audit, dan Lingkungan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Akbar, D. S. (2015). Peranan karakteristik pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. *Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3(1), 39–53.
- Asikin, D. F. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja (studi empiris pada pemerintah kota makassar provinsi sulawesi selatan)*.
- Fatimah, M. & W. (2017). e-jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma Website : *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 51–69.
- Gita, I. P. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Pemanfaatan E-SBN Ritel Online Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*.
- Ibrahim, drinanda dan saksesa, P. (2015). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. *Tekun*, VI(01), 82–95.
- Indriana. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Ekonomi Invoice*, 1(1), 1–28.

Kalauw, A. amin. (2018). Pengaruh Kualitas Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Efektivitas Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(2), 94–99.

Kurniasari, D., Kurniasari, D., & Marta, M. S. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Ilmu Administrasi Publik*, 2, 1–14.

Lastiar Hutapea, H., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>

Machmud, M., & Kawung, G. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.

Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>

Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assesment System, E-Commerce dan keterbukaan akses informasi rekening bank terhadap niat melakukan penghindaran pajak (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Pangestika, F. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governace, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Pengembangan, P., & Dan, A. (1994). *Bab I*. 1–31.

Purnamasari. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan. *Ilmiah Edukasi*, 157–164.

Sahri, H. R. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *JOM FEKON*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Verasvera, F. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.